BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Sejak masa penjajahan Belanda sampai permulaan tahun 1942 di Indonesia telah dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, baik milik pemerintah, daerah otonom (gemente), swasta maupun patungan antara pemerintah dengan swasta.

Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 01 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan dengan Akte Pendirian Notaris Mr. Andrian Hendrik van Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik oleh Djawa Denki Djigo Sha Bandoeng dengan wilayah kerja di seluruh pulau Jawa.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami periode perjuangan fisik sampai tibanya saat penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan penguasaan pelistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai Pemerintah Republik Indonesia karena pada tahun tersebut dimulainya nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Maka pada tanggal 27 Desmber 1957 diambil alih oleh pemerintah RI yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum PLN sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN di Jawa Barat kecuali Jakarta dan Tangerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas, dan wilayah kerjanya di daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi PT. PLN (Persero) sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai dengan akte pendiriannya.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena akan mempermudah pembagian tugas yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Adapun susunan organisasi PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Barat berupa organisasi fungsional dan staf jenjang manajemen yang meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan, dan pelaksanaan. Selain itu ada bagian yang

merupakan kontrol intern yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan yang merupakan pejabat pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

2.3 DESKRIPSI JABATAN

Dalam melaksanakan tugas pokoknya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana tenaga listrik.
2. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga listrik.
3. Perencanaan dan pembinaan penjualan tenaga listrik dan pelayanan kepada para pelanggan.
4. Pengawasan dan pelaksanaan distribusi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat memiliki unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan
2. Unsur Pembantu Pimpinan, terdiri dari :
   - Bidang perencanaan
   - Bidang konstruksi
   - Bidang perusahaan
   - Bidang keuangan
   - Bidang kepegawaian dan administrasi
   - Cabang-cabang
   - Unit Pengatur Distribusi

3. Unsur Pengawasan dan Kontrol Intern

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam susunan organisasi distribusi adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin

Pemimpin mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a) Memimpin, mengurus dan mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya dan guna dari distribusi.

b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan distribusi.

c) Mewakili distribusi di dalam dan di luar perusahaan.

d) Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus distribusi yang telah digariskan oleh direksi.

e) Menetapkan kebijaksanaan distribusi sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Direksi.

f) Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahun distribusi lengkap dengan anggaran keuangan.

g) Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan.

h) Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pengawas serta mengatur semua hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i) Menetapkan kebijaksanaan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana, pendistribusian tenaga listrik dan sumber daya manusia.

j) Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan pendistribusian berdasarkan kebijaksanaan direksi dan peraturan perundang-undangan.

k) Mengendalikan pelaksanaan tugas para deputi pemimpin dan kepala kontrol intern.

l) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.

2. Bidang Perencanaan

Tugas pokok bidang perencanaan adalah merumuskan rencana korporat distribusi, pengembangan sistem pendistribusian tenaga listrik, kebutuhan investasi, penyajian data informasi serta melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja distribusi.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang perencanaan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan korporat distribusi.

b) Perencanaan sistem pendistribusian tenaga kerja.

c) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data.

d) Pengevakuasian kinerja distribusi.

Bidang perencanaan terdiri dari :

a) Bagian perencanaan sistem

b) Bagian sistem informasi

c) Bagian perencanaan perusahaan.

3. Bidang Konstruksi

Tugas pokok bidang konstruksi adalah mengelola pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

Bidang konstruksi mempunyai fungsi :

a) Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pembangunan dan pemugaran sarana.

b) Pendistribusian tenaga listrik meliputi kegiatan pelaksanaan fisik, pengorganisasian kegiatan, penyusunan anggaran, laporan penggunaan dana pemantauan kemajuan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian listrik.

c) Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.

d) Perencanaan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi untuk pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian.

Bidang konstruksi terdiri dari :

a) Bagian perencanaan konstruksi distribusi

b) Bagian administrasi proyek

c) Bagian pengendalian konstruksi distribusi

d) Bagian perbekalan konstruksi distribusi

4. Bidang Pengusahaan

Tugas pokok bidang pengusahaan adalah merencanakan, mengendalikan dan membina pengoperasian dan pemeliharaan sarana tenaga listrik dan pelayanan kepada pelanggan tenaga listrik dan listrik pedesaan.

Bidang pengusahaan mempunyai fungsi :

a) Perencanaan penyediaan tenaga listrik dan pelayanan tenaga listrik.
b) Perencanaan pengendalian pengoperasian, pemeliharaan sarana pendistribusian tenaga listrik.
c) Pengendalian dan pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi.
d) Pengendalian perbekalan pengoperasian dan pemeliharaan sarana pendistribusian listrik.
e) Pembinaan pengusaha listrik pedesaan.

Bidang pengusahaan terdiri dari :

a) Bagian pemasaran
b) Bagian teknik distribusi
c) Bagian listrik pedesaan
d) Bagian perbekalan pengusahaan distribusi

5. Bidang Keuangan

Tugas pokok bidang keuangan adalah menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja, mengelola keuangan dan akuntansi pengusahaan,

pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik serta menyusun laporan keuangan.

Bidang keuangan mempunyai fungsi :

a) Menyusun dan memantau anggaran pendapatan dan belanja serta pembinaan tarif dasar listrik.
b) Mengelola dana.
c) Mengelola aliran uang.
d) Pembelanjaan pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
e) Pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi pengusahaan, pembangunan dan pemugaran sarana pendistribusian tenaga listrik.
f) Melaksanakan tata usaha
g) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan.

Bidang keuangan terdiri dari :

a) Bagian anggaran
b) Bagian keuangan, terdiri dari :
    - Seksi pengendalian keuangan
    - Seksi tata usaha keuangan pengusahaan
    - Seksi tata usaha keuangan konstruksi

    Bagian keuangan mempunyai fungsi :

    - Menyusun, memantau, anggaran pendapatan dan belanja serta pembinaan tarif listrik.
    - Pengelolaan dana keuangan.

- Pengelolaan aliran uang.
- Pengelolaan tata usaha keuangan distribusi.

c) Bagian Akuntansi

d) Bagian tata usaha keuangan distribusi

6. Bidang Kepegawaian dan Administrasi

Tugas pokok bidang kepegawaian dan administrasi adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum serta pelayanan hukum dan hubungan masyarakat (humas).

Bidang kepegawaian dan administrasi mempunyai fungsi :

a) Pembinaan organisasi, sumber daya manusia dan sarana kerja.

b) Melaksanakan tata usaha kepegawaian.

c) Melaksanakan administrasi umum.

d) Melaksanakan pengelolaan sarana kerja.

e) Melaksanakan dan menyiapkan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum.

f) Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.

Bidang kepegawaian dan administrasi terdiri dari :

a) Bagian perencanaan pegawai dan fasilitas.

b) Bagian kepegawaian.

c) Bagian sekretaris umum

d) Bagian umum dan hubungan masyarakat

7. Kontrol Intern

Tugas pokok adalah membantu pemimpin dalam mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas sistem manajemen distribusi dan memberikan laporan dan saran perbaikannya.

Kontrol intern mempunyai fungsi :

a) Pemeriksaan dan penilaian sistem pengendalian manajemen distribusi dan pelaksanaannya di bidang pembangunan dan sarana pendistribusian tenaga listrik.
b) Pemeriksaan dan penilaian organisasi pegawai, sarana kerja serta keuangan pembangunan pendistribusian tenaga listrik.
c) Pelaksanaan pelayanan kebutuhan dan keluhan pelanggan tenaga listrik.
d) Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan administrasi di unitnya.
e) Pengelolaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan suku cadang.

8. Cabang

Tugas pokok Cabang adalah tugas operatif yang menyangkut distribusi dan penjualan tenaga listrik serta pelayanan pelanggan.

Cabang mempunyai fungsi :

a) Pelaksana penjualan tenaga listrik.
b) Pelaksanaan pengusahaan tenaga listrik.

c) Pelaksanaan pelayanan kebutuhan dan keluhan pelanggan tenaga listrik.

d) Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan administrasi di unitnya.

e) Pengelolaan sarana pendistribusian tenaga listrik dan suku cadang.

9. Unit Pengatur Distribusi

Tugas pokok pengatur distribusi adalah menyelenggarakan tugas operasional yang menyangkut pelaksanaan operasional sarana pendistribusian tenaga listrik secara terpadu.

Unit Pengatur Distribusi mempunyai fungsi :

a) Perencanaan pengaturan sarana pendistribusian tenaga listrik secara terpadu.

b) Pelaksanaan dan pengendalian operasi sarana pendistribusian tenaga listrik.

c) Pengawasan dan pembinaan pemeliharaan sarana pengolahan data informasi pendistribusian tenaga listrik.

d) Pengolahan sumber daya manusia, keuangan, dan administrasi dan unitnya.

10. Bengkel Distribusi

Tugas pokok bengkel distribusi adalah menyelenggarakan tugas perbaikan sarana pendistribusian tenaga listrik dan pengujian sarana instalasi, alat pembatas dan pengukur tenaga listrik.

Bengkel distribusi mempunyai fungsi :

a) Perencanaan perbaikan sarana instalasi tenaga listrik dan alat pembatas dan pengukuran tenaga listrik.
b) Pelaksanaan pengujian sarana instalasi dan alat pembatas pengukuran aliran tenaga listrik.
c) Pembinaan serta pengujian alat pembatas dan pengukuran yang penerapannya dilaksanakan oleh cabang.
d) Pembinaan pemeliharaan sarana perbengkelan dan laboratorium.
e) Pembinaan sumber daya manusia, keuangan dan administrasinya.

2.4 ASPEK KEGIATAN KERJA PRAKTEK

Sesuai dengan kerja praktek yang dilakukan penulis, yakni di bagian akuntansi maka penulis akan menerangkan uraian tugas pokok bagian akuntansi. Sebagaimana penulis ditempatkan dalam kerja praktek di bagian akuntansi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

Bagian Akuntansi yang dipimpin seorang kepala bagian membawahi beberapa bagian, yaitu:

1) Bagian Akuntansi

- Menangani, mengawasi, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan akuntansi pada umumnya yang meliputi antara lain, pencatatan, pengikhtisaran, dan menyusun laporan berkala atas data dan dokumen (evidence) keuangan/akuntansi serta melaksanakan analisis dan evaluasi keuangan yang diperlukan.
- Melaksanakan penyusunan laporan keuangan/akuntansi untuk unit administrasi yang bersangkutan.

2) Seksi Akuntansi Pengusahaan

Seksi akuntansi pengusahaan bertugas :

- Menghimpun surat keputusan, surat edaran, pengumpulan petunjuk pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh PLN Distribusi Jawa Barat maupun yang di ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya serta mengikuti perubahan perkembangan.
- Membina unit-unit mengenai pelaksanaan kegiatan akuntansi pada umumnya.
- Menerima, memeriksa dan memantau serta menganalisa laporan keuangan (LP) dan laporan perhitungan tahunan (LPT) dari unit-unit dan satuan administrasi sebagai bahan penyusun laporan (LP/LPT) PLN Distribusi Jawa Barat.
- Memantau dan mengawasi saldo-saldo perkiraan aktiva dan pasiva lancar, perkiraan penutupan rekening koran. Perkiraan netral dan sebagaimana unit-unit satuan administrasi lainnya.

- Menerima unit-unit lain mengenai penerimaan BBM yang dibayar secara terpusat dan menindak lanjutinya.
- Menerima rekening koran atas pengiriman BBM secara terpusat dan membuat rekonsiliasinya.
- Memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya kepada unit-unit.
- Mencatat, mengawasi, dan mengikuti perubahan seluruh inventaris yang ada urusannya untuk disampaikan datanya kepada urusan akuntansi aktiva tetap dan urusan fasilitas dan inventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan data yang diperlukan untuk bahan laporan mengenai bidangnya.

3) Seksi Akuntansi Konstruksi

Seksi Akuntansi Konstruksi mempunyai tugas :

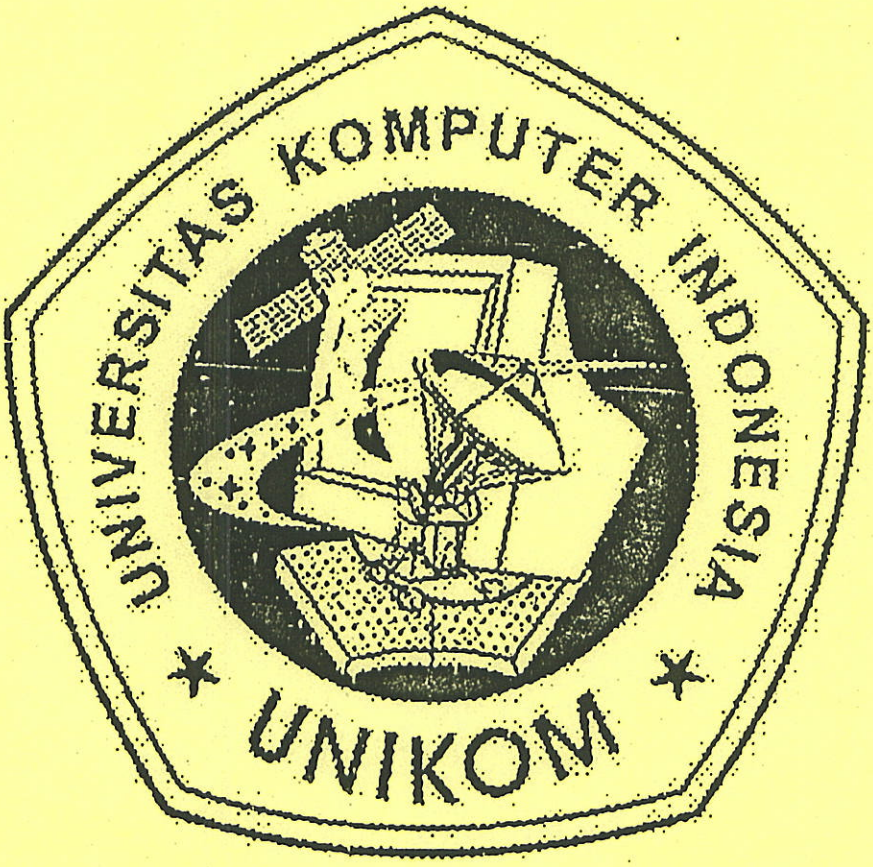
- Melaksanakan administrasi PDP konstruksi baik yang dilaksanakan oleh kantor Distribusi maupun unit-unit.
- Mencatat biaya PDP konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk rincian sumber dananya.
- Memantau pelaksanaan PDP konstruksi dan memproses lebih lanjut PDP yang telah selesai serta melanjutkannya kepada urusan pengelolaan akuntansi.
- Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan dari hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada unit-unit.

- Bekerja sama dengan unit-unit bagian dan instansi-instansi yang berkaitan dalam melaksanakan tugasnya.
- Menyiapkan data yang diperlukan untuk bahan laporan mengenai bidang tugasnya.
- Mencatat, mengawasi, dan mengikuti perubahan-perubahan seluruh inventaris yang ada untuk disampaikan kepada urusan akuntansi AT dan urusan fasilitas dan inventarisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Akuntansi Umum

Seksi ini mempunyai tugas :

a. Menghimpun surat-surat keputusan, surat edaran, surat pengumuman, surat petunjuk pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh PLN Pusat maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
b. Membuat dan menerima buku-buku harian (memorial) dari seksi dan bagian lain serta membukukannya ke dalam kartu buku besar.
c. Membuat dan menerima nota-nota pembukuan dari unit-unit dan satuan administrasi lainnya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM